

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia turut serta dan berperan aktif dalam setiap kegiatan dan program-program pembangunan yang menjadi agenda organisasi negara-negara di dunia yang tercakup dalam Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB. Salah satu program pembangunan yang disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000 adalah deklarasi *Millenium Development Goals* (MDG's) atau Tujuan Pertumbuhan Milenium sebagai tujuan pertumbuhan global *United Nation Development Program* (UNDP, 2004).

Tujuan utama MDG's berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia dan diupayakan untuk lebih mengakomodasi nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, sehingga lebih mudah untuk diaplikasi. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDG's sebagai acuan dalam kebijakan pertumbuhan nasional.

Disamping tujuan utama, MDG's mempunyai tujuan : 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) Menuntaskan pendidikan dasar, 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Mengurangi kematian anak, 5) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan, 6) Mengatasi HIV/AIDS, malaria dan berbagai penyakit lainnya, 7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan 8) Membentuk kemitraan global dalam pelaksanaan pertumbuhan. Sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global

untuk merealisasikannya, tetapi MDG bukan tujuan PBB. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan.

Dari ke-8 (delapan) tujuan tersebut yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah pada tujuan ke-3 (tiga) yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2000). Upaya dan program dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia tercantum dalam GBHN 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pertumbuhan Nasional (PROPENAS 2000-2004), yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pertumbuhan Nasional. Implementasi dari program tersebut kembali dituangkan dalam kebijakan nasional dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pertumbuhan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Dalam melaksanakan PUG sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi maupun di kabupaten/ kota, melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan serta aspirasi perempuan dalam pertumbuhan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang berbasis kesetaraan gender dimana peran masyarakat baik laki-laki dan perempuan sangat penting dalam keberhasilan pembangunan, sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan harus dilihat sebagai subyek,

agen perubahan, pendorong, yang merupakan potensi dan aset yang sangat berharga di dalam mengisi pertumbuhan Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan dan keadilan gender merupakan kunci dan alat dalam mencapai berbagai program pertumbuhan yang ada. (Hatta, 2007)

World Bank (2000) dalam Todaro (2003) menyebutkan meski berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki sudah dimiliki, namun pada kenyataannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang masih tetap berlangsung. Diskriminasi itu terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, seperti bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan berbagai sektor publik serta lingkup keluarga. Hal yang paling merugikan dari ketidaksetaraan gender adalah menurunnya kualitas kehidupan. Dengan menahan akumulasi sumber daya manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumber daya, jasa publik, atau aktifitas produktif, maka diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan.

Salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan wilayah selalu diukur dengan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan bahwa pembangunan di wilayah atau negara tersebut mengalami perkembangan positif dan sebaliknya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak mencerminkan peran serta antara penduduk laki-laki

dan penduduk perempuan memiliki porsi yang sama dalam pembangunan, bahkan cenderung peran serta penduduk perempuan masih sangat rendah dibandingkan dengan peran serta laki-laki dalam pencapaian tersebut.

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dan beberapa indikator penunjang di sektor pendidikan (ditunjukkan dengan angka penduduk yang memiliki ijazah SMA ketas), sektor kesehatan (ditunjukkan dengan angka harapan hidup) dan sektor ketenagakerjaan (ditunjukkan dengan angka partisipasi angkatan kerja) dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Yg Berpendidikan SMA Keatas dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta Harapan Hidup Sumatera Utara Tahun 2004 – 2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (EG)	Penduduk Berpendidikan SMA Keatas (PSMA)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (AK)		Harapan Hidup (HH)	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
	(Persen)	(Persen)		(Persen)		(Tahun)	
2004	5,74	34,67	25,70	84,74	15,26	66,30	70,20
2005	5,48	34,56	25,56	85,18	14,82	66,80	70,80
2006	6,20	36,22	29,24	82,13	17,87	67,00	70,90
2007	6,90	36,83	29,95	82,28	17,72	67,20	71,10
2008	6,39	36,74	29,82	82,05	17,95	67,10	71,00
2009	5,07	35,69	29,63	83,36	16,64	67,44	71,36
2010	6,35	37,22	31,90	59,68	40,32	67,25	71,15
2011	6,70	37,26	33,91	59,01	40,99	67,39	71,31
2012	6,22	37,24	33,71	62,51	37,49	67,69	71,62
2013	6,01	37,02	33,51	58,26	41,74	67,78	71,71

Sumber : BPS, Tahun 2014

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perekonomian di Sumatera Utara yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dari tahun 2004 hingga tahun 2013 bergerak ke arah positif yang berarti menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, meskipun di tahun 2005 dan tahun 2009 serta tahun 2013 menunjukkan penurunan, namun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara menunjukkan arah perkembangan yang positif.

Di sisi lain pada sektor pendidikan yang diproksi dari angka penduduk usia 10 tahun keatas yang berpendidikan SMA keatas yang dirinci berdasarkan jenis kelamin, di tahun 2004 menunjukkan angka penduduk yang berpendidikan SMA keatas untuk laki-laki sebesar 34,67 persen sedangkan untuk perempuan sebesar 25,70 persen. Hingga akhir tahun 2013 angka penduduk yang berpendidikan SMA keatas laki-laki sebesar 37,02 persen dan perempuan sebesar 33,51 persen. Secara agregat angka penduduk yang berpendidikan SMA keatas yang dirinci berdasarkan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun demikian angka penduduk yang berpendidikan SMA keatas yang tertinggi masih didominasi oleh laki-laki.

Sektor tenaga kerja yang ditunjukkan berdasarkan angka partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, dimana di tahun 2004 angka partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 84,74 persen sedangkan perempuan sebesar 15,26 persen, hingga tahun 2013 angka partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 58,26 persen dan perempuan sebesar 41,74 persen. Secara agregat partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh laki-laki secara signifikan.

Sektor kesehatan yang ditunjukkan oleh angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di tahun 2004 sebesar 66,30 persen laki-laki dan sebesar 70,20 persen perempuan. Sedangkan di tahun 2013 sebesar 67,78 persen laki-laki dan 71,71 persen perempuan. Secara agregat angka harapan hidup perempuan masih lebih tinggi dibanding dengan angka harapan hidup laki-laki.

Dari uraian diatas secara umum jika dianalisis pengaruh sektor-sektor dalam pembangunan yang ditunjukkan dari sektor pendidikan, sektor tenaga kerja dan sektor kesehatan yang berbasis gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini. Dimana jika dilihat secara kuantitatif berdasarkan data-data yang ada terlihat bahwa sektor pendidikan didominasi oleh laki-laki, sektor tenaga kerja didominasi oleh laki-laki dan sektor kesehatan didominasi oleh perempuan, sedangkan ketiga sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian di Sumatera Utara.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti masalah “Analisis Determinant Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Gender di Sumatera Utara”

1.2. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi berperspektif gender memiliki cakupan yang luas, untuk keperluan penelitian ini, fokus masalah adalah : Bagaimana pengaruh sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang berbasis gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang berbasis gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan.

1. Pada aspek pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam menambah khasanah empiris dari teori-teori ekonomi.
2. Pada aspek kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi perencana dan perencanaan pertumbuhan, sehingga tujuan pertumbuhan yakni kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.